

**PENGUJIAN AKTIF MAHKMAH KONSTITUSI SEBAGAI
BENTUK IMPLEMENTASI *THE GUARDIAN OF THE
CONSTITUTION***

SKRIPSI

Oleh:

**RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN SIHOMBING NABABAN
1640050070**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PENGUJIAN AKTIF MAHKMAH KONSTITUSI SEBAGAI
BENTUK IMPLEMENTASI *THE GUARDIAN OF THE
CONSTITUTION***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN SIHOMBING NABABAN
1640050070



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan di era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2030

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dalam hukum dalam masyarakat
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis *problem solving* dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk mencairkan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan :

Nama : Ruben Saputra Hasiholan S Nababan
NIM : 1640050070
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul " Pengujian Aktif Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Implementasi *The Guardian of Constitution* " adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang di nyatakan di atas, maka karya tugas akhir saya ini dianggap batal.

Jakarta, 7 Juli 2023



Ruben Saputra Hasiholan S Nababan

1640050070



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Ruben Saputra Hasiholan S
NIM : 1640050070
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pengujian Aktif Mahkama Konstitusi Sebagai Bentuk Implementasi *The Guardian of Constitution*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Juli 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

I Dewa Ayu Widyan, S.H., M.H.

(0017115803)

Pembimbing II

Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

(8991000020)

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

(0327046303)



Dr. Hendri Javadi, S.H., M.H.

(0302117904)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

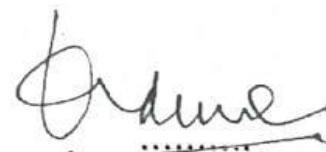
Pada tanggal 7 Juli 2023 telah diselenggarakan sidang skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Ruben Saputra Hasiholan S Nababan
NIM : 1640050070
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Pengujian Aktif Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Implementasi *The Guardian of Constitution*

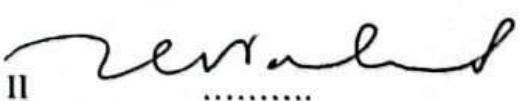
Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam	Tanda tangan
	Tim Penguji	

1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H., Penguji I



2. Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H Penguji II



3. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. Penguji III



HALAMAN PENGESAHAN

PENGUJIAN AKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI *THE GUARDIAN OF CONSTITUTION*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Ruben Saputra Hasiholan S Nababan
NIM : 1640050070
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Pada tanggal 7 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Pengaji

Pengaji I

Pengaji II

I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H

Pdt. Marudut Silitonga, S.Th.,S.H.,M.H

Pengaji III



Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruben Saputra Hasiholan S Nababan
Nim : 1640050070
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pengujian Aktif Mahkamah Konsitusio Sebagai Bentuk Implementasi *The Guardian Of*

Constitution

Menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\
3. Saya memberikan Hak Non-Ekslusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari di temukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Jakarta, 20 September 2023

Ruben Saputra H 
6D4AKX642521744 n

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, serta kasih karunia Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum. Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**PENGUJIAN AKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION**". Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Administrasi khusunya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu ku yang sudah berada di sisi-Nya dan juga kepada Opungku tercinta yang sudah membesarkan aku dari kecil, ia menjadi pengganti kedua orang tua ku dalam membimbing ku menjalani kehidupan ini, Pada saat penulisan kata pengantar ini saya yakin kedua orang tua ku melihat dan mendoakan untuk kelulusan ku dan untuk opung terimakasih atas pengorbanan opung lakukan kepada ku, ini ku persembahkan untuk mu pung sekali lagi terimakasih opung tercinta ku MARSINTA BR. HUTAGALUNG

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memiliki peran besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis Ingin mengucapkan terimakasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayanti S.H., M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Ibu I Dewa Ayu Widyantri, S.H., M.H. dan Bapak Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I Dan Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik, dan juga memberi kesempatan kepada saya agar dapat Sidang dan Lulus di Tahun 2023 ini
6. Viktor Gatot Hamongan Nababan, Sabar Parningotan Nababan, Jefri Polman Nababan selaku Bapak Uda ku yang selalu mensuport aku selama ini, dan sudah Penulis anggap seperti Ayah kandung sendiri
7. Citra Santika Putri yang telah menemani ku dan juga memberi semangat selama kuliah dan tugas akhir skripsi ini, yang selalu mengingatkan untuk mengikuti kelas perkuliahan, terimakasih
8. Ezra Natama, Jeremi Sianturi, Everthius Edgart, Selaku Sahabat-Sahabat ku yang setia menemani, memberi tawa dan canda selama ini. Juga selama penulisan skripsi ini, Terimakasih banyak Sahabat-sahabat ku.

Jakarta, 6 Juli 2023
Ruben Saputra Hasiholan S Nababan

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	6
D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN.....	7
1. Jenis Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	8
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Pengolahan Data	10
6. Metode Analisis Data	11
F. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP	12

G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Teori	20
1. Teori Kepastian Hukum.....	20
2. Teori Kewenangan.....	24
B. Tinjauan Mengenai Mahkamah Konstitusi	32
C. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	33
D. Tinjauan Mengenai <i>Judicial review (Toetsingsrecht)</i>	37
E. Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia.....	39
F. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	43
BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT ATAU TIDAKNYA DISEBUT SEBAGAI <i>THE GUARDIAN OF CONSTITUTION</i> KETIKA DALAM MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEORANG PEMOHON HARUS MENGALAMI KERUGIAN KONSTITUSIONAL TERLEBIH DAHULU.....	47
A. Analisis Mengenai Mahkamah Konstitusi <i>The Guardian Of Constitution</i> .47	
1. Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution	47
2. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Hal <i>Judicial Review</i>	51
B. Dasar Hukum Permohonan <i>Judicial Review</i> di Wilayah Mahkamah Konstitusi	55
C. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	57
D. Analisis Penulis	59
BAB IV Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> Harus Ada Atau Tidaknya Pemohon.....	62

A.	<i>Legal Standing</i> Lenbaga Negara Sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar	62
B.	<i>Ius Curia Novit</i> Sebagai Landasan Hakim Untuk Memerik Undang-Undang Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar	66
C.	Independen dan Imprasial Mahkamah Konstitusi Sebagai Sifat Kewenangan Hakim	67
D.	Permohonan <i>Judicial Review</i> Seolah Seperti Delik Aduan	70
E.	Analisis Penulis	71
	BAB V PENUTUP.....	75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	78



ABSTRAK

A.	Nama	:	Ruben Saputra Hasiholan S Nababan
B.	NIM	:	1640050070
C.	Program Kekhususan	:	Hukum Administrasi Negara
D.	Judul	:	Pengujian Aktif Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Implementasi <i>The Guardian Of Constitution</i>
E.	Halaman	:	84
F.	Kata Kunci	:	Pengujian Aktif Mahkamah Konstitusi
G.	Ringkasan Isi	:	

Pasal 10 Ayat (1) dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengkonfirmasi bahwa "Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mutlak untuk memberikan keputusan akhir dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." Secara umum, proses pengujian ini biasanya dilakukan melalui prosedur pengujian konstitusionalitas. Dalam prosedur tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menerima gugatan atau permintaan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi belum menjalankan peran aktif sebagai "Pengawal Konstitusi." Ini terlihat dari masih banyaknya undang-undang yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konstitusi kita. Baru-baru ini, kita juga menyaksikan penolakan yang signifikan terhadap undang-undang baru di negara kita, yang datang dari berbagai kelompok seperti buruh, pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Ini mencerminkan bahwa masyarakat merasa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi peranannya dalam melindungi hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi kepada rakyatnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah Mahkamah Konstitusi masih dapat disebut sebagai "Pengawal Konstitusi," terutama dalam konteks pembatalan undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini juga akan membahas apakah Mahkamah Konstitusi hanya dapat melakukan Judicial Review ketika ada pihak yang mengalami kerugian konstitusional.

Dalam kerangka penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif, yang umumnya dikenal sebagai penelitian kepustakaan, merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini berlandaskan pada konsep Teori Kepastian Hukum, Konsep Negara Hukum, dan Teori Kewenangan.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dapat Atau Tidaknya Disebut Sebagai The Guardian Of Constitution Dalam Membatalkan Undang-Undang yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar yaitu melalui Hakim Konstitusi dapat melakukan penelitian dan membahas perkara yang diajukan secara mandiri (*ex officio*), meskipun tanpa adanya pemohon yang secara spesifik mengajukan permohonan pembatalan undang-undang. Apabila hal tersebut terjadi berarti Hakim Konstitusi memiliki otonomi dalam menentukan

perkara yang akan diputus dan melakukan penelitian serta pengujian konstitusional secara mandiri tanpa harus adanya pemohon penguji undang-undang tersebut. Biasanya, keputusan untuk menguji kekonstitusionalan undang-undang secara mandiri didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kepentingan masyarakat yang melibatkan prinsip-prinsip konstitusional sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang membatasi wewenang hakim, hal ini juga dikarenakan Indonesia masih menganut system hukum civil law, dimana Undang-Undang menjadi landasan utama dalam berperkara.

- H. Daftar Acuan : 26 Buku + 3 Perundang-undangan
- I. Dosen Pembimbing I : I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H



ABSTRACT

A.	Name	:	Ruben Saputra Hasiholan S Nababan
B.	NIM	:	1640050070
C.	Specialization Program	:	Hukum Administrasi Negara
D.	Title	:	Pengujian Aktif Mahkamah Konstitusi
<i>Sebagai Bentuk Implementasi The Guardian Of Constitution</i>			
E.	Number of page	:	84
F.	Keyword	:	Pengujian Aktif Mahkamah Konstitusi
G.	Content Summary	:	

Article 10 Paragraph (1) in Law no. 4 of 2004 confirms that "the Constitutional Court has absolute authority to provide final decisions in judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." In general, this testing process is usually carried out through constitutionality testing procedures. In this procedure, the Constitutional Court can accept lawsuits or requests to test the constitutionality of laws or government policies. However, in several cases, it appears that the Constitutional Court has not carried out an active role as a "Guardian of the Constitution." This can be seen from the fact that there are still many laws that do not fully reflect the principles contained in our Constitution. Recently, we have also witnessed significant resistance to new laws in our country, coming from various groups such as workers, students, students and others. This reflects that the public feels that the government has not fully fulfilled its role in protecting the rights guaranteed by the Constitution to its people. Therefore, the aim of this research is to evaluate whether the Constitutional Court can still be called the "Guardian of the Constitution," especially in the context of canceling laws that violate the 1945 Constitution. This research will also discuss whether the Constitutional Court can only carry out Judicial Review when a party experiences constitutional loss.

Within the framework of this research, the author applies a normative legal research approach. The normative legal research approach, which is generally known as library research, is a research method that involves the collection and analysis of library documents or secondary data. This research is based on the concepts of Legal Certainty Theory, the Concept of the Rule of Law, and the Theory of Authority.

*The results obtained from this research are whether or not the position of the Constitutional Court can be called the Guardian of the Constitution in canceling laws that conflict with the Constitution, namely that Constitutional Justices can conduct research and discuss cases submitted independently (*ex officio*). , even without the applicant specifically submitting a request for cancellation of the law. If this happens, it means that the Constitutional Justices have autonomy in determining the cases to be decided and carry out research and constitutional review independently without the applicant having to examine the law. Usually, the decision to examine the constitutionality of a law independently is based on legal considerations and the interests of society which involve constitutional principles*

in line with the provisions of the 1945 Constitution and the Law on Judicial Powers which limit the authority of judges, this is also because Indonesia still adheres to a civil law legal system, where the law is the main basis for litigation

- H. Reference List : 26 Book + 3 Legislation
- I. Supervision I : I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.
- J. Supervision II : Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H

